

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIAN DESA
YOGYAKARTA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
UTARA TEGAL JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu

Sosial Islam dalam ilmu Dakwah

Disusun Oleh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Nano
SUNAN KALIJAGA
02231114
YOGYAKARTA

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIAN DESA
YOGYAKARTA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
UTARA TEGAL JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu

Sosial Islam dalam ilmu Dakwah

Disusun Oleh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Nano
SUNAN KALIJAGA
02231114
YOGYAKARTA

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISALAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. MOKH. NAZILI, M. Pd.
DOSEN FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nano
Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Nano
NIM : 02231114
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah**

Maka kami sebagai pembimbing penulisan skripsi ini berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat diujikan di depan Sidang Munaqasyah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial Islam (S.Sos.I.) dalam Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Oktober 2007

Pembimbing Skripsi

Drs.Mokh. Nazili,M.Pd
NIP: 150.296.398



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telpon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN/02/DD/PP.00.9/1295/2007

Judul Skripsi:

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIAN DESA YOGYAKARTA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UTARA
TEGAL JAWA TENGAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a n o
NIM. 02231114

Telah dimunaqsyahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Oktober 2007

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQSYAH

Ketua Sidang

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
NIP. 150267223

An. Sekretaris Sidang
Kajur PMI

Drs. Aziz Muslim, M.Pd.
NIP. 150267221

Pembimbing

Drs. Mokh. Nazik, M.Pd.
NIP. 150246398

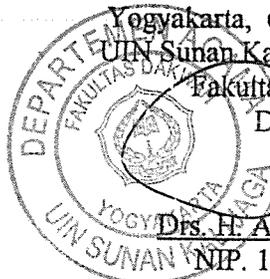
Penguji I

Drs. Abror Sodik, M.Si.
NIP. 150240124

Penguji II

Sriharini, S.Ag., M.Si.
NIP. 150282648

Yogyakarta, 6 Nopember 2007
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan
Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP. 15022293



HALAMAN MOTTO

من عمل صالحا لهما من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه
حياة طيبة؛ ولنجزينهم اجرهم باحسن
ما كانوا يعملون

" Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang telah mereka kerjakan " (Q.S. An-Nahl: 97)¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumnatul 'Ali-ART, 2004), hlm. 279

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi ini Kepada :

♥ *Orang Tua ku tercinta, yang telah membimbing dan mencurahkan kasih dan sayangnya kepada ku.*

♥ *Adik-adik ku Tercinta, Wartinah, Zainal, Udin, Afi & Iko, Janganlah berputus asa meraih cita-cita kalian.*

♥ *Istriku tersayang Tri Kurniawati yang setia menemaniku sepanjang masa, berdoalah selalu agar kita meraih tempat yang mulia disisi-Nya.*

♥ *Almarater- ku, Desa kampung halamanku*

♥ *Agama, Bangsa dan Negri- ku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على جميع امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على حبيبنا المختار محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang. Penguasa jagad raya dan isinya. Hanya kepada-Nya kita bersimpuh pasrah dan kepada-Nyalah kita mohon segala permintaan dan pertolongan.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengerahkan segala daya dan upayanya dalam mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju masa depan yang cerah sampai titik darah penghabisan.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Afif Rifai, MS selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
3. Drs. Aziz Muslim, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga
4. Drs.Mokh.Nazili,M.Pd, selaku pembimbing skripsi.

5. Drs. Abror Sodik, M.Si dan Sriharini, S.Ag, M.Si selaku penguji skripsi
6. Semua dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis
7. Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Akhmad Mudiyanto dan Ibunda Mudiah yang telah memberikan do'a dan dorongan moril kepada penulis.

Kepada beliau semua, Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih besar dari pada pengorbanan yang mereka berikan kepada penulis selama ini. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah Ilmu dakwah di Indonesia.

Yogyakarta, 03 Oktober 2007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Landasan Teori.....	10
1. Konsep Pemberdayaan.....	10
2. Masyarakat Pesisir	18
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	20
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat	24
5. Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	26
6. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	30

G. Metode Penelitian.....	33
1. Subyek, Obyek dan Tempat Penelitian.....	33
2. Metode Pengumpulan Data	35
3. Metode Analisi Data.....	37

BAB II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIAN DESA

A. Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa.....	38
B. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa.....	39
C. Badan Usaha Dian Mandala.....	39
D. Jumlah Pekerja dan Karyawan.....	41
E. Hari dan Jam Kerja.....	42
F. Sistem Upah.....	42
G. Sistem Asuransi.....	43

BAB III. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DIAN DESA YOGYAKARTA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

A. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa.....	44
1. Upaya Pendekatan Pemberdayaan.....	44
2. Pendampingan dalam Pemberdayaan.....	47
a. Motivator.....	50
b. Penguatan.....	51

c. Perlindungan.....	52
d. Pendukungan.....	53
B. Partisipasi Masyarakat.....	60
C. Proses Pembuatan Kerajinan Kulit Ikan Pari.....	63
1. Peralatan Industri Kerajinan Kulit Ikan Pari.....	63
2. Proses Pembuatan Industri Kerajinan Kulit Ikan Pari	64

BAB IV. PENUTUP

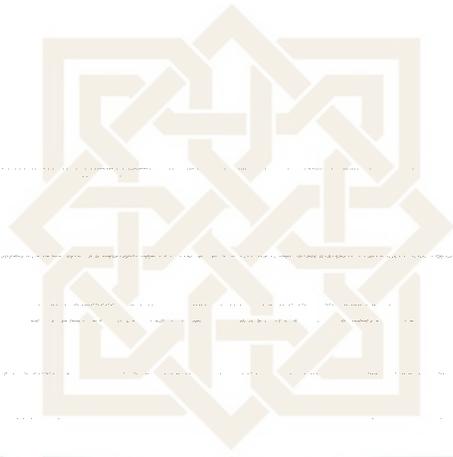
A. Kesimpulan	66
B. Saran	74
C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “ Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah.” Untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap pengertian judul tersebut, maka diperlukan penjelasan dan pembatasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, adapun istilah-istilah yang perlu dijejaskan adalah:

1. Peran

Istilah Peran dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹ Adapun yang penulis maksudkan dalam hal ini adalah peran yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat pesisir utara Tegal Jawa Tengah.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta

Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada tahun 1972 di Yogyakarta, program-

¹ Drs. Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pres, 1991) hlm. 1132

program kegiatan yang dikembangkan antara lain suplai air dan teknologi perairan, teknologi pangan dan pertanian serta industri kerajinan penyamakan kulit ikan pari. Adapun yang penulis maksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa disini adalah tugas dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa dalam keikutsertaannya membantu masyarakat pesisir untuk mengelola keberadaan kulit ikan pari

3. Pemberdayaan

Secara luas, istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment* yang diartikan sebagai pemberkuasaan, pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat lemah (*disadvantaged*).² Adapun yang penulis maksudkan dengan pemberdayaan disini adalah proses penyadaran masyarakat atas kemampuan diri dalam meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Edi Suharto, *Sistem Dasar dan Pemberdayaan Klien Perspektif Pekerja Sosial*, Makalah TOT, BPDTS, Bandung, 2000

4. Masyarakat Pesisir

Secara istilah masyarakat pesisir adalah sebutan yang diatribusikan kepada kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di tepi pantai atau berdekatan dengan laut.³ Adapun yang penulis maksud dengan masyarakat pesisir adalah masyarakat pesisir yang berada di wilayah kabupaten Tegal, dimana keberadaan masyarakatnya melakukan program kegiatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta dalam bentuk pengembangan industri kerajinan penyamakan kulit ikan pari.

Judul skripsi ini bermaksud meneliti tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir melalui kegiatan usaha pengelolaan industri kerajinan kulit ikan pari di wilayah kabupaten Tegal Jawa Tengah.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Luas wilayah Indonesia keseluruhan mencapai 7,7 juta km yang terdiri dari luas wilayah daratan 1,9 juta km (24,7%) dan luas wilayah lautan mencapai 7,7 juta km (73,3%). Luas wilayah laut (maritim) Indonesia tersebut terperinci lagi sebagai berikut:

1. Laut wilayah 0,3 juta km.
2. Perairan kepulauan :2,8 juta km

³ Siti Aminah, "Gandang Bakau dan Orang Pesisir" dalam Muhammad HidayatRahz (ed.), *Kita Masih Harus Merawat Bumi; Antologi Kisah Mencintai Lingkungan*, (Bandung: Ashoka Indonesia, 2000), hlm. 19.

3. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusip : 2,7 juta km

(Rencana Strategi Dep. Eks. Laut dan Perikanan, 2000)

Berdasar potensi wilayah tersebut, sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan harapan bangsa di masa depan. Di dalam wilayah laut dan pesisir tersebut terkandung sejumlah potensi pembangunan yang besar dan beragam, antara lain meliputi:

1. Sumber daya dapat diperbaharui (*renewable resources*), seperti ikan, udang, moluska, karamang mutiara, kepiting rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, dan lamun.
2. Sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Seperti gas dan minyak bumi, bauksit, timah, biji besi, mangan dan fosfor.
3. Energi kelautan, seperti energi gelombang pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energi Conversion*).
4. Jasa-jasa lingkungan seperti tempat-tempat habitat yang indah dan menyejukan untuk potensi pariwisata dan rekreasi, media transportasi dan komunikasi, pengatur iklim, dan penampung limbah.
5. Adanya potensi temuan-temuan benda berharga asal muatan kapal tenggelam dibawah permukaan laut yang mempunyai nilai ekonomi dan sejarah yang tinggi. Sebagai pemersatu dan perekat kesatuan bangsa serta pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan potensi wilayah tersebut, prospek pembangunan kelautan di masa depan diharapkan semakin cerah. Menyimak pola dan praktek pembangunan kelautan

selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) menunjukkan adanya sejumlah keberhasilan, namun juga menyisakan beragam permasalahan yang besar dan mengancam kesinambungan pembangunan. Permasalahan tersebut antara lain berupa pencemaran, penangkapan yang berlebihan (*overfishing*), degradasi fisik (*habitat*) pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estauria), konflik penggunaan ruang dan sumber daya, pencurian ikan dan pembuangan limbah secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk pesisir pantai, khususnya petani dan nelayan.⁴

Secara normatif, masyarakat pesisir seharusnya merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber alamnya yang besar, namun pada kenyataan hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Menyadari potensi dan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan tersebut maka sudah saatnya memulai adanya perubahan paradigma pembangunan kelautan dan perikanan, yang semula memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai objek penelitian dan wahana pemersatu, berkembang menjadi paradigma pembangunan yang mengembangkan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru serta mendukung kesejahteraan pada pelaku pembangunan secara adil, dengan tetap mempertahankan terpeliharanya daya dukung

⁴ Moh. Ali Aziz dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 133

dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga diperoleh pemanfaatan secara seimbang dan berkelanjutan.

Menyimak pidato Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi dalam pemberian penghargaan Adi Bakti Mina Bahari tahun 2005 di Jakarta mengatakan:⁵

“ Potensi sumberdaya dan perikanan apabila dikelola secara tepat dan bijak akan mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu juga akan mampu menciptakan lapangan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi bangsa dan negara Indonesia, Namun begitu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterpaduan dalam kerja sama.

Menteri mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama membarantas praktik-praktik ilegal dibidang kelautan dan perikanan, lebih penting dari itu ia meminta untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut demi menjaga produktivitas sumberdaya perikanan, dan mengelola pulau-pulau kecil yang jumlahnya belasan ribu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir serta meningkatkan perekonomian nasional.”

Menyadari akan potensi kelautan Indonesia yang belum terkelola secara maksimal dan permasalahan kemiskinan yang menimpa masyarakat pesisir tersebut, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dian Desa Yogyakarta memprakarsai terbentuknya badan usaha Dian Mandala sebagai mitra kerja dengan masyarakat pesisir Tegal Jawa Tengah dalam usaha pengelolaan sumber daya kelautan dalam bentuk

⁵ *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 06 Maret 2006, hlm. 14.

industri penyamakan dan kerajinan kulit ikan pari, dimana keberadaan kulit ikan pari pada awalnya dianggap sebagai limbah dari daging ikan pari yang tidak bisa dikonsumsi. Cara ini adalah sebagai alternatif pembangunan dan pengembangan masyarakat pesisir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan serta meningkatkan relevansi program pembangunan masyarakat lokal, dengan mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat dan melakukan penelitian di Lembaga Swadaya masyarakat Dian Desa Yogyakarta. ketertarikan tersebut didasari atas :

Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta memiliki misi dan visi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dari usaha pemberdayaan masyarakat dengan mengakomodir antara potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dengan pemanfaatan kemajuan teknologi sehingga strategi demikian sangatlah tepat dan sesuai dengan harapan dan cita-cita agar masyarakat menjadi berdaya guna menuju bangsa yang mandiri.

Kedua, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sangat erat kaitannya dengan proses-proses pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam bagaimana tinjauan pemberdayaan secara *empiris* dapat menjadi kontribusi aktif bagi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga (UIN) khususnya bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir utara Tegal Jawa Tengah?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat pesisir utara Tegal dalam proses pemberdayaan melalui pengelolaan industri kerajinan kulit ikan pari?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya masyarakat Dian Desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir utara Tegal Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat pesisir utara Tegal dalam keterlibatan pengembangan industri kerajinan kulit ikan pari.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya wacana tentang konsep pemberdayaan masyarakat pesisir dan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah usaha produksi kerajinan kulit ikan pari sebagai usaha menciptakan keberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan ekonomi masyarakat pesisir sebagai langkah guna mendukung perekonomian nasional dalam bentuk industri kerajinan hasil laut.

Satu diskripsi tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kulit ikan pari yang dikembangkan menjadi industri kerajinan kulit diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih *komprehensif* di dalam penelitian yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga nantinya dapat memberikan masukan secara

obyektif bagi Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat pesisir.

F. LANDASAN TEORI

1. Konsep Pemberdayaan⁶

Konsep pemberdayaan mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti *Eksistensialisme*, *Fenomenologi*, dan *Personalisme*. Disusul kemudian dengan gelombang pemikiran *Neo-marxisme*, *Freudianisme*, termasuk didalamnya aliran-aliran *Strukturalisme* dan sosiologi kritik sekolah Frankurt. Bermunculan konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, anti kemapanan (*anti-establishment*), gerakan populis, anti struktur, legitimasi, ideology, pembebasan, dan *civil society*.

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejalan dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke – 20 yang lebih dikenal sebagai aliran *post-modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon *antisistem*, *antistruktur*, dan anti *determinisme* yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep pemberdayaan akibat dari reaksi terhadap

⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2004), hlm. 1

alam pemikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara.

Pada awal gerakan modern. Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (*humanisme*). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme, dan personalisme yang menolak segala bentuk *power* yang bermuara hanya pada proses *dehumanisasi eksistensi* manusia. Demikian juga aliran neo-marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal diatas dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.

Sosiologi struktural fungsionalis Parson menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah *variable* jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya dalam pembangunan ekonomi). Logikannya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negative terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan

pengertian lain kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Hal inilah yang oleh Schumaccker disebut Pemberdayaan.

Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat *Zero-Zum*, maksudnya proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya *power* kelompok terhadap kelompok lainnya. Weber mendefinisikan *Power* sebagai kemampuan seseorang/individu/kelompok untuk mewujudkan keinginannya, kendati pun terpaksa menentang lainnya, jika keadaan seperti itu, istilah pemberdayaan yang disamakan dengan *power* harus dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengadakan reformasi sosial.

Craig dan Mayo menyatakan bahwa perspektif Marxis terhadap *power* dalam masyarakat kapitalis tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi. *Power* ini bersinggungan erat dengan kepentingan-kepentingan kapitalis lewat kerja sama transnasional yang berskala global. Dalam keadaan semacam itu, pemberdayaan masyarakat miskin dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis, karena itu masyarakat miskin dan sangat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kemampuan tawar menawar (*bargaining position*) dan pelayanan terhadap masyarakat miskin pun semakin meningkat, namun demikian keadaan ini tidak terlepas dari masalah untung dalam pasar global.

Perspektif Marxis terhadap *power of ideas* adalah proses *setting ideology* dan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci untuk menganalisis kerangka kerja ekonomi dan kekuatan politik. Keduanya dimanfaatkan sebagai alat *legitimasi* dan *constestable* yang efektif dalam masyarakat kapitalis. Hal tersebut merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi, politik, dan transformasi sosial.

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.

Menurut Rappaport, Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang, sedangkan menurut McArdle, mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle

mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.⁷

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian tersebut, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia.

Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah dengan pemahaman kekuasaan seperti ini maka pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

⁷ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2004), hlm.1-3

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja kata bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Apabila pemberdayaan dilihat dari faktor tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan maka dapat di ketahui bahwa :⁸

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 57-60.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah, kekuasaan disini diartikan bukan hanya kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.

- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang-barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan, sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai sebuah tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dalam visi pemberdayaan masyarakat semua masalah dan cita kemasyarakatan menjadi tugas masyarakat dan semua masalah kesejahteraan warga masyarakat dipecahkan dan diatasi sendiri oleh masyarakat.⁹ Konsep pemberdayaan (*empowerment*), mengandung niat dan visi bahwa yang kuat bukan

⁹ Noeng Muhadjir, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 63.

melemahkan yang lemah, melainkan membantu agar masing-masing dapat mandiri dan berkembang menuju keunggulan. Motivasi untuk mandiri dan menjadi unggul terutama harus tumbuh dari dalam, bukan tumbuh karena bantuan pihak lain. Kerja keras bervisi dan upaya belajar berkelanjutan untuk mandiri dan upaya menjadi unggul perlu menjadi bagian dari kehidupan setiap anak bangsa.

Untuk menumbuh-kembangkan kemandirian menurut Noeng Muhadjir¹⁰ diperlukan upaya pembenahan :

Pertama, kesadaran ganda perlu ditumbuhkan menjadi kesadaran tunggal. *Kedua*, menumbuh-kembangkan *community based society*. *Ketiga*, membuat rakyat termotivasi untuk terbuka terhadap dunia global, sekaligus mampu bekerja keras dengan visi ke depan, mempunyai tekad yang mandiri sebagai bangsa ataupun individu, menuju keunggulan. *Keempat*, menyadari keseluruhan hak dan kewajiban manusia sebagai warga dunia dan warga negara. *Kelima*, mengembangkan *public policy* menjadi *social policy*.

2. Masyarakat Pesisir

Masyarakat Pesisir (*coastal community*) diterjemahkan dengan ciri-ciri utama tidak memproduksi barang ataupun jasa tertentu, mengandalkan penghidupan dari sumber daya laut, dan jika ada alat produksi biasanya berupa perahu, dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

sistem ekonomi yang hierarkis seperti ada juragan kapal, tengkulak, buruh, dan nelayan tradisional.¹¹

Suatu pendapat yang sangat tepat disampaikan oleh Fatik Wijaya, masyarakat pesisir itu tidak identik dengan nelayan, masyarakat pesisir tidak harus berprofesi sebagai nelayan atau penangkap ikan, tetapi dapat mengembangkan berbagai usaha dengan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautan. Kekayaan pesisir dan kelautan tidak terbatas pada ikan, melainkan hingga meliputi budidaya, kerajinan, pariwisata, energi gelombang, energi angin, energi surya, minyak dan gas serta berbagai potensi lainnya.¹²

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dari arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan jika dilihat dari arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Batasan wilayah pesisir tidak hanya didasarkan atas pendekatan geografis saja, akan tetapi batas wilayah pesisir mencakup pada mata pencaharian penduduk,

¹¹ Esrom Aritonang, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa/INDHRA, 2001), hlm. 12.

¹² Syarofin Arba MF, *Memberdayakan Masyarakat Pesisir, Kedaulatan Rakyat*, 18 September 2003. hlm. 10

yang masih ada kaitannya dengan produksi laut, batasan ini akan menjadi lebih luas lagi apabila dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir.

Dengan demikian wilayah pesisir menjadi sangat luas sekali tergantung dari sudut mana kita melihatnya, batas wilayah pesisir kearah daratan bisa sampai ke daerah hulu sungai apabila di situ terdapat kegiatan manusia secara nyata menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumberdaya di bagian hilir. Sedangkan ke arah laut, Rochmin dan kawan-kawan cenderung menyesuaikan dengan batas *juridis* yang berlaku di setiap propinsi.¹³

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas, yakni pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of Power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.¹⁴

¹³ Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-3.

¹⁴ Pranarka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 63.

Esrom Aritonang menambahkan, pemberdayaan sebagai usaha mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumber daya masyarakat agar membela diri.¹⁵

Disisi lain Koesnadi Hardja Soemantri berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.¹⁶

Pada akhir-akhir ini di Indonesia pemberdayaan merupakan suatu wacana strategis yang sangat populer karena seringnya kata itu diucapkan oleh pemimpin dan cendikiawan Indonesia dalam wacana pembangunan. Jika tidak dibarengi dengan tindakan kongrit ditengah masyarakat, wacana pembangunan yang di usung dengan wacana pemberdayaan hanya akan berhenti pada sebatas tingkat wacana politik, tanpa memiliki makna yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Ginandjar Kartasasmita menyebutkan tiga tahapan yang perlu dilakukan¹⁷:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*anabling*) titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam

¹⁵ Esrom Aritonang dkk., *Op. Cit.* hlm. 9.

¹⁶ Koesnadi Hardja Soemantri, *Pemberdayaan Masyarakat berwawasan lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 61.

¹⁷ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: CIDES, 1996), hlm. 145.

membangun daya yaitu mendorong (*encourage*) memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai penyediaan, berbagai masukan (*input*) dan berbagai peluang (*opportunities*) membuat mereka menjadi berdaya yaitu peningkatan taraf pendidikan, informasi dan lapangan kerja.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi dan membela kepentingan yang lemah agar tidak bertambah lemah menghadapi yang kuat. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah adanya upaya-upaya *riil* untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta *eksploitasi* yang kuat terhadap yang lemah.

Moeljarto melihat model pemberdayaan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

- a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus diletakan pada masyarakat sendiri.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai kebutuhannya.
- c. Mentoleransi variasi lokal sehingga sifatnya amat fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal.
- d. Menekankan pada proses sosial *learning*.

¹⁸ Moeljarto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, konsep arah dan strategi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 68.

- e. Proses pembentukan jaringan antara birokrasi dan LSM, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup :¹⁹

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pengembangan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial antara lain :²⁰

- 1) Kemampuan masyarakat mengenal masalah mereka sendiri.
- 2) Keinginan dan ikut sertanya masyarakat untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

¹⁹ Edi Suharto, *Op. Cit.* hlm. 4.

²⁰ T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1991), hlm. 71.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Hal yang penting dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*counciosness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggungjawabnya secara politik, ekonomi dan budaya sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan atau ketidakberdayaan yang terjadi padanya, sebagaimana apa yang di ungkapkan Freire mengatakan bahwa dengan kesadaran kritis ia mampu melihat kedalam diri serta menggunakan apa yang ia dengar, ia lihat, ia alami untuk memahami apa yang sedang terjadi dilingkungannya.

Kesadaran hendaknya dimulai dari individu, kelompok hingga komunitas. Tujuan kesadaran adalah memperjelas soal aspirasi, penderitaan duka cita dalam perspektif sosial dan politik yang lebih luas. Melalui partisipasi sebagai cara untuk mengungkap aspirasi dari apa yang ia dengar, ia lihat dan apa yang ia alami.

Partisipasi memiliki pengertian sebagai suatu proses yang aktif yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan melakukan kebebasannya untuk melakukan hal itu.²¹ Konsep dari gagasan partisipasi menurut Mansoer Fakih mengatakan bahwa pada dasarnya partisipasi merupakan pemberdayaan, partisipasi bermakna mencari ruang kepada rakyat untuk

²¹ Britha Mikkelson, *Metode Penelitian Partisipasi dalam Upaya-upaya Pemberdayaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 64.

menjadi subyek terhadap proses perubahan sosial, pengambilan keputusan dan aksi melawan ketidakadilan untuk transformasi sosial mereka sendiri.²²

Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapi serta mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka, oleh karenanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting.

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh Krimer dalam Tesis Ismail adalah:²³

- a. Partisipasi dan proses pengambilan keputusan pada kebijaksanaan program yang akan dijalankan, dengan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut diharapkan kepentingan dan permasalahan masyarakat miskin akan tercermin dalam program yang dibuat.
- b. Partisipasi dalam pembangunan program, sebagai kelompok sasaran yang berkedudukan sebagai konsumen program, maka agar program sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kelompok sasaran, mereka perlu didengar pendapat dan nasehatnya tentang kebutuhan dan kepentingan yang betul-betul riil.
- c. Partisipasi dalam gerakan sosial, dalam hal ini lapisan masyarakat miskin dilihat sebagai pihak yang tidak berdaya. Agar mereka dapat ikut serta dalam proses

²² Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998). hlm. 12

²³ Ismail, *Efektifitas Program IDT dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di NTT*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2001, hlm. 34.

pengambilan keputusan dibutuhkan stimulasi dan dukungan agar dapat menjadi *pressure group* yang efektif.

- d. Partisipasi berupa keterlibatan dalam berbagai pekerjaan. Hal ini didasari bahwa mereka menjadi miskin karena terbatasnya alternative bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan guna meningkatkan partisipasinya.

Partisipasi ini adalah proses belajar untuk meningkatkan kesadaran. Wujud kesadaran akan meningkatkan partisipasi, partisipasi tidak hanya bersifat *horizontal* (sesama anggota atau masyarakat) tetapi juga mampu berpartisipasi secara *vertikal* (pemerintah atau lembaga swasta), partisipasi tersebut pada akhirnya mampu melaksanakan perubahan atas ketidakberdayaan menuju keberdayaan.

5 Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam membantu masyarakat miskin, ada empat pendekatan yang dipakai oleh LSM. Keempat pendekatan itu didasarkan pada persepsi mereka mengenai keberadaan masyarakat miskin, yakni:

Pertama, pendekatan sosio-karitatif, yakni pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat adalah miskin, menderita, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sejumlah LSM, khususnya yang berlatar belakang keagamaan, menggunakan pendekatan ini dengan cara misalnya, mendirikan panti jompo, rumah yatim piatu, membuat program beasiswa.

Kedua, pendekatan sosio-reformis. Pendekatan ini dilakukan secara *aksidental*, dengan maksud mengembalikan keadaan menjadi normal kembali. Bentuk kegiatannya antara lain seperti karya kesehatan, menolong persoalan pribadi (antara lain masalah ketergantungan terhadap narkoba), penanggulangan bencana alam dan kelaparan.

Ketiga, pendekatan sosio-ekonomis, yakni suatu pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat, maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini belakangan disebut pemberdayaan.

Keempat, pendekatan sosio-transformis. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa peranan LSM dalam proses pembangunan selama ini adalah: a). Menyelenggarakan pelbagai kegiatan *inovatif* yang bila berhasil dapat direplikasi oleh pemerintah dan organisasi lain melalui program yang lebih luas; b). Melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat; c). Menyelenggarakan pelbagai forum dialog tentang kebijakan serta berfungsi sebagai katalis bagi pelbagai aktor pembangunan.

Pada praktek dilapangan kegiatan LSM ada yang melakukan pendampingan secara individu maupun kelompok, peranannya adalah mendampingi kelompok binaan dengan jalan:

Pertama, menggali motivasi dan membangkitkan kesadaran anggota kelompok, dalam penggalian motivasi ini diasumsikan bahwa anggota kelompok, bagaimanapun keadaannya, mempunyai motivasi sendiri. Jadi yang dilakukan bukanlah memberi motivasi, melainkan membantu menggali motivasi.

Kedua, membantu perkembangan, seperti pendidikan dan latihan, pemupukan modal dan pengelolaan. Pendampingan ini diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya serap kelompok.

Ketiga, mengkatalisir hubungan kerja sama antar kelompok, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga lain demi tercapainya tingkat kemandirian yang tinggi.²⁴

Sistem pendampingan dalam membina aktifitas kelompok (masyarakat) adalah bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok (masyarakat) sebagai *fasilitator* (pemandu), *Komunikator* (penghubung), maupun *dinamisator* (penggerak), maupun sebagai *motivator* (penggali), yang pada hakekat dan tujuannya adalah membantu rakyat kecil yang rentan dan miskin untuk

²⁴ Banbang Ismawan, *Pemberdayaan Orang Miskin*, (Jakarta: Puspa Swara, 2000) hal. 9-16.

diberdayakan kemudian berkembang atas kekuatan mereka sendiri, atau dengan kata lain membantu proses kemandirian atau keswadayaan masyarakat.²⁵

Penyadaran tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri atau melalui perorangan. Penyadaran dengan pemberdayaan erat kaitannya dengan pendampingan. Dengan demikian, rakyat atau komunitas berada dalam wadah organisasi dalam satu kelompok. Kelompok adalah sebagai wadah masyarakat untuk berkumpul dan bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka.

Dari sisi lembaga, terbatasnya kesanggupan lembaga untuk mendampingi seluruh masyarakat desa, lembaga mencoba melakukan pendekatan pengembangan masyarakat, dengan harapan hasil-hasil yang positif dapat disebarluaskan keanggota masyarakat lainnya.²⁶ Sedangkan pendampingan merupakan istilah yang berkembang dikalangan dunia LSM. Pendampingan berasal dari kata damping artinya masyarakat bersifat sejajar, tidak ada yang menjadi atasan atau bawahan. Karena pada dasarnya pendampingan adalah *egaliter* atau kesederajatan kedudukan.²⁷

Pendampingan mempunyai fungsi krusial dalam membina aktifitas kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai *fasilitator* (pemandu), *komunikator* (penghubung), atau *dinamisator* (Penggerak). Dengan adanya pendamping ini, kelompok diharapkan

²⁵ Momon Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm.3.

²⁶ Panduan Teknis I, Pengembangan Kelompok Tani, *www. Google. Com 2002*

²⁷ Esrom Aritonang, *Op. Cit.*, hlm. 7

tidak bergantung pada pihak luar, namun dapat tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri. Untuk itu, pendamping diharapkan menjadi pihak yang membantu kelompok untuk suatu masa tertentu dan diharapkan nantinya kelompok akan dapat berfungsi secara mandiri.²⁸

6. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kehidupan kemanusiaan sehari-sehari pada dasarnya adalah terapan ilmu dan teknologi, baik yang dikembangkan secara sadar maupun tidak. Pengembangannya secara sadar akan menyebabkan terapan teknologi menimbang berbagai ilmu dan pengetahuan kehidupan manusia lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama.

Berbagai konstelasi terapan ilmu dan teknologi diantara pengetahuan kemanusiaannya lainnya telah banyak dikemukakan, namun analog dengan pendekatan konsepsi ideal atau konsepsi manusia seutuhnya merupakan konsepsi ideal kemanusiaan yang terletak pada pengertian kemandiriannya, bahwa manusia dengan kebutuhan unsur-unsurnya memiliki nilai diri yang spesifik. Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri.

Seseorang yang mandiri adalah seorang yang berhasil membangun nilai dirinya sedemikian rupa sehingga mampu menempatkan perannya dalam alam kehidupan kemanusiaannya dengan penuh manfaat. Kemandirian seseorang dapat

²⁸ Pranarka, *Op. Cit.*, hlm. 142.

diukur dengan sejauhmana kehadiran dirinya memberikan manfaat kearah kesempurnaan dalam sistem yang lebih luas.

Dalam proses perkembangan ilmu teknologi, sepanjang sejarah kehidupan kemanusiaan ditunjukkan adanya fenomena dialektika. Penyelesaian suatu persoalan dengan teknologi akan selalu membawa bibit-bibit persoalan baru, yang pada suatu waktu pasti akan menjadi persoalan utama, yang membutuhkan suatu penyelesaian pula.²⁹

Diperkenalkannya teknologi kedalam satu sistem sosial (masyarakat), terutama di kalangan masyarakat petani yang masih tradisional, dapat membawa berbagai perubahan sosial (struktur kemasyarakatan, sikap, persepsi, dan perilaku) masyarakat yang bersangkutan.³⁰

Kehadiran dan keberadaan teknologi harus mempunyai peran dan strategis dan menentukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, yang akhirnya bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pada hakekatnya bukanlah sebuah proses yang semata-mata untuk meningkatkan tersedianya sumber daya di masyarakat. Pembangunan harus dipandang sebagai sebuah proses besar dalam memberdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat.³¹

²⁹ Moh. Ali Aziz, *Op. Cit.*, hal. 175.

³⁰ Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi pedesaan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 153.

³¹ Moh. Ali Aziz *Op. Cit.*, hlm. 176.

Era globalisasi menuntut semua pekerjaan diselesaikan dengan cepat dan tepat sehingga penerapan teknologi tepat guna tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh masyarakat. Bentuk dan pengolahan sumber daya alam di modernisasikan sebagai upaya pemanfaatan kemajuan teknologi dan mengaktualisasikan pencapaian kesejahteraan materil.

Bentuk pengembangan teknologi tepat guna harus kita pandang sebagai usaha yang lebih luas dan lebih mendalam dari pada usaha memperkenalkan teknik-teknik sederhana yang lebih maju dari yang digunakan sekarang demi peningkatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, demi meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan energi setempat serta demi pengembangan industrialisasi di lingkungan masyarakat.

Pada masyarakat pasca-industri berkembang pemikiran postmodern, Pemikiran posmodern berupaya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pencapaian kesejahteraan yang lebih menghargai harkat dan martabat manusia. Pengakuan terhadap kebebasan dan peluang untuk berfikir maju, untuk berkembang dalam ekonomi, budaya, sosial, politik, dan keyakinan agama merupakan kesejahteraan yang didambakan masyarakat masa depan. Dalam perkembangannya berfikir posmo diperlukan oleh siapapun, baik di negara pasca industri, negara

industri, maupun negara berkembang, yang hendak menyiapkan masa depan lebih baik.³²

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan/tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.³³ Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan fakta dan menghasilkan dalil atau dasar hukum yang benar.³⁴ Adapun langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Subyek, Obyek, dan Informan dan tempat penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengurus LSM Dian Desa Yogyakarta, pengurus Dian Mandala Yogyakarta dan masyarakat pesisir yang tergabung dalam anggota kelompok usaha Dian Jaya Kabupaten Tegal.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah peran LSM Dian Desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta.

- Noeng Muhadjir, *Op. Cit.*, hlm. 42.

³³ Anton H. Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6

³⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14

c. Informan Penelitian

Informan yang dimintai keterangan terdiri atas pengurus LSM Dian Desa, Pengurus Badan Usaha Dian Mandala, dan anggota masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok usaha Dian Jaya Kabupaten Tegal.

d. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi, antara lain:

1) Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah

Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah adalah salah satu wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dian Desa, di wilayah tersebut terdapat tiga pelabuhan yang digunakan sebagai sentral Tempat Penjualan Ikan (TPI) oleh para nelayan, yaitu Pelabuhan Congor (tengah), Pelabuhan Baro (timur), dan Pelabuhan Brug Abang (barat). Sementara pelabuhan yang paling ramai oleh para pedagang ikan adalah Pelabuhan Congor yang terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal.³⁵

Lokasi yang menjadi objek Pemberdayaan oleh Dian Desa adalah kelompok usaha pengepulan kulit ikan pari Dian Jaya yang berlokasi di Dusun Pekauman Kulon RT 04/03 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Turi, Kabupaten Tegal Jawa Tengah.

³⁵ Observasi, 15 April 2006, di Kab. Tegal.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa Yogyakarta

Lembagaa Swadaya masyarakat Dian Desa adalah nama sebuah LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Teknologi Tepat Guna, yang bertempat tinggal di Jl. Kaliurang Km. 7. Jurug Sari VI/19 Yogyakarta.

3) Badan Usaha Dian Mandala Yogyakarta

Badan usaha Dian Mandala adalah sebuah Badan usaha yang dibentuk Dian Desa untuk menjawab kebutuhan tertentu dan menjalankam proyek penyamakan industri kulit ikan pari, yang bertempat tinggal di Jl. Kaliurang Km. 7. Jurug Sari VI/19 Yogyakarta 55281. Telp: (0274) 880 650.

E-mail:dianmandala@yahoo.com/info@dianmandala.com

murminari@yahoo.com

2. Metode Pengumpulan Data

a. Interview atau wawancara

Metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian. Metode ini diterapkan dengan menggunakan jenis wawancara

informal.³⁶ Adapun data yang diungkap dalam interview ini antara lain tentang sejarah berdirinya LSM Dian Desa Yogyakarta, Badan Usaha Dian Mandala Yogyakarta, peran LSM Dian Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan hasil pemberdayaan masyarakat

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁷ Metode ini digunakan dalam rangka untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh LSM Dian Desa Yogyakarta. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subyek penelitian.³⁸

c. Dokumentasi

Metode ini adalah penggalian data dari dokumentasi-dokumentasi kegiatan LSM Dian Desa yang berwujud dalam bentuk tulisan maupun barang yang dapat dijadikan dokumentasi untuk memperoleh data yang dicapai.

³⁶ Lexy. J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung, Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 142

3. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses menyusun, mengategorikan data sehingga dapat ditafsirkan.³⁹ Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penulis sajikan secara diskriptif, analisa kualitatif, yaitu cara menggambarkan keadaan apa adanya menurut apa yang dilihat dan didengar tentang obyek penelitian, sejauh mana data yang dibutuhkan. Data yang terkumpul dari subyek penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif.

Berangkat dari landasan teori dan data, maka analisa dilakukan dengan pendekatan induktif kemudian diadakan analisa data dengan cara semua data yang telah terkumpul diambil bagian-bagian yang diperlukan kemudian dikelompokan sesuai dengan kerangka laporan dan diacukan pada konsep-konsep yang telah digunakan baru diadakan analisa yang mengacu pada konsep-konsep yang telah digunakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992) hlm. 126

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa menempatkan peran di tengah masyarakat melalui pendekatan kemasyarakatan secara humanis dan setrategis yaitu: dengan memfasilitasi kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat, antara kelompok masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok usaha Dian Jaya dengan kelompok masyarakat luar yang tergabung dalam kelompok usaha Dian Mandala.

Adapun pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan bertujuan untuk menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat)

antara yang kuat dan lemah, dan mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Memelihara kondisi yang kondusif yang tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sebagai hasil dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maka keterlibatan semua unsur masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangun yang akan berpusat pada rakyat. Peran serta masyarakat merupakan sarana efektif untuk menjangkau keberdayaan masyarakat melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.

Dalam hal ini LSM Dian Desa melalui badan Usaha Dian Mandala menjalin ikatan kerja sama dengan sebagian anggota masyarakat pesisir untuk mengelola keberadaan kulit ikan pari menjadi suatu produk yang dirubah menjadi bentuk industri kerajinan. Dengan berupaya mendorong semangat wiraswasta untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (*inovasi*) melalui partisipasi masyarakat.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pengembangan masyarakat. Bentuk dari partisipasi masyarakat ini adalah kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok usaha Dian Jaya, fungsi dan peran kelompok swadaya masyarakat ini sebagai media dalam usaha meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir dengan berupaya menggali dan memobilisasi pengepulan kulit ikan pari yang ada disekitar lingkungan mereka.

Strategi ini meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektifitas, efesiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM Dian Desa Yogyakarta, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jaminan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil (kelompok

grassroot) dapat memperoleh keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Namun, penyertaan para sukarelawan LSM dalam proses pemberdayaan itu bukanlah satu-satunya cara pemberdayaan.

Dari adanya temuan data dilapangan bahwa usaha pemanfaatan kulit ikan Pari oleh LSM Dian Desa melalui badan usaha Dian Mandala dan kerja sama masyarakat pesisir kedalam suatu bentuk industri kerajinan kulit ikan pari merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat pesisir yang disatupadukan antara potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). langkah ini pada dasarnya adalah menerapkan kemampuan rekayasa kealaman untuk membawa suatu keadaan (berupa materi, energi, gerak, dan kemanusiaan secara terpadu) ke keadaan lain yang lebih berdaya guna dan bermanfaat guna mengatasi masalah sosial ekonomi dan lingkungan.

Upaya pendayagunaan potensi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam telah dijalankan oleh LSM Dian Desa Yogyakarta, keberadaannya sebagai LSM setidaknya telah memerankan fungsinya sebagai fasilitator, komunikator dan motivator dalam tugas pendampingan dan pengembangan masyarakat pesisir. Sebagai komunikator, LSM Dian Desa berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan kendala maupun permasalahan yang dihadapi. Selaku komunikator, LSM Dian Desa harus mau menerima dan memberi berbagai informasi dari berbagai sumber untuk dijadikan

masuk dalam merumuskan, menamngani dan melaksanakan program. Selaku fasilitator, LSM Dian Desa memberi pengarahan dalam menggunakan pendekatan, strategi dan teknis dalam pelaksanaan program.

Tugas dan peran LSM Dian Desa terhadap masyarakat pesisir itu pada intinya adalah berusaha memperkenalkan ide-ide baru kepada masyarakat pesisir, yang kemudian diserap dan disebarluaskan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam berbagai kerja pemberdayaan kemasyarakatan, LSM Dian Desa telah menjalankan peran sebagai stimulus dan dukungan kepada masyarakat, peran pendidik, peran perwakilan dan peran pengembang keterampilan teknis. Tak mudah bagi LSM Dian Desa mengakomodasikan peran-peran idealitas, sehingga perlu pemilihan mana peran yang menjadi prioritas dan mana peran secara sukarela.

Aktivitas Dian Desa dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir telah membuahkan hasil yang positif, mengantarkan masyarakat menuju lebih berdaya guna dalam menggali potensi yang mereka miliki, pemberdayaan masyarakat yang merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan dalam pengelolaan kulit ikan pari telah mendorong kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemandirian.

Keberhasilan ini tak lepas dari adanya komitmen dan kesadaran masyarakat kalau mereka sebenarnya mampu mengatasi masalah dan mampu menggali potensi yang mereka miliki, bahkan mereka mampu mengelola sehingga membuahkan hasil yang

diharapkan. Disini masyarakat mulai menunjukkan kompetensi bahwa mereka mampu berbuat dan bekerja apabila diberi kepercayaan dan kesempatan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dian Desa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir memainkan peran sebagai pekerja sosial mendampingi masyarakat dalam mengantarkan mereka pada sikap terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar budaya mereka, serta menyadarkan mereka dari permasalahan ketidaktahuan akan potensi kulit ikan pari. LSM Dian Desa sekaligus berperan sebagai fasilitator pembangunan masyarakat pesisir dengan berupaya memfasilitasi pembentukan badan usaha industri kerajinan penyamakan kulit ikan pari Dian Mandala dan kelompok swadaya masyarakat Dian Jaya sebagai mitra usaha bersama yang saling menguntungkan.
2. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan yang dilakukan Dian Desa berupa terbentuknya kelompok swadaya masyarakat dengan nama "Dian Jaya." Keberadaan kelompok usaha masyarakat ini adalah bentuk dari kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dalam usaha memanfaatkan keberadaan kulit ikan pari sebagai akses ekonomi kelautan. Hal ini merupakan peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

3. Hasil dari upaya pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa meliputi pembentukan badan usaha Dian Mandala dan Dian Jaya dalam usaha pengumpulan, pemanfaatan dan pengelolaan limbah kulit ikan pari menjadi industri kerajinan kulit ikan pari yang dibuat dalam bentuk Tas, Ikat pinggang, dan asesoris lainnya. Pengelolaan kulit ikan pari dikembangkan dan dijalankan secara terorganisir *dari* masyarakat, *oleh* masyarakat dan *untuk* masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dan kemauan teknologi, dimana kemajuan teknologi digunakan untuk menghasilkan dan mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir.
4. Diprakarsainya pembentukan badan usaha Dian Mandala merupakan langkah strategis LSM Dian Desa dalam melanjutkan proses pemberdayaan masyarakat pesisir, hal ini disadari bahwa LSM Dian Desa adalah lembaga *non profit*, maka untuk melanjutkan program pemberdayaan masyarakat perlu dibentuk kelompok usaha sebagai mitra usaha dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5. Pengelolaan sumberdaya kelautan (kulit ikan Pari) telah dikelola secara tepat dan bijak kedalam bentuk industri kerajinan kulit ikan pari dengan memadukan tiga unsur potensi alam, potensi manusia dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna maka langkah ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

maupun nelayan. Disamping itu juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi bangsa dan negara Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan LSM Dian Desa melalui badan usaha Dian Mandala telah membawa kemajuan dan manfaat bagi masyarakat pesisir dan masyarakat lainnya, kemajuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil kekayaan laut Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.
- c. Membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir maupun masyarakat yang lebih luas.
- d. Terciptanya industri kerajinan kulit ikan pari sebagai salah satu aset ekonomi kerajinan laut Indonesia.

B. Saran

Setelah penulis melakukan kajian terhadap LSM Dian Desa Yogyakarta dalam pemberdayaan masyarakat pesisir utara Tegal Jawa Tengah, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti khususnya kepada :

1. LSM Dian Desa

Dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir dan memanfaatkan sumber-sumber potensi kelautan laut Indonesia, Sebaiknya, masyarakat pesisir diberi kesempatan secara luas untuk dapat memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki masyarakat semakin baik kemampuan berpartisipasinya

2. Masyarakat Pesisir

Pemanfaatan potensi kelautan dalam memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dengan optimalisasi penggunaan sumber-sumber lokal, dan pelibatan semua pihak, koordinasi program secara lebih intensif dengan pemerintah dan masyarakat merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat yang semestinya selalu di tingkatkan. Maka perlu diupayakan strategi penumbuhan kesadaran masyarakat untuk menganalisis masalah yang mereka hadapi, mengidentifikasi sebab-akibat (hubungan kausalitas), menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru untuk memajukan diri mereka sendiri. Juga perlu

dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui proses dialog (persiapan kerja sama, pembentukan kemitraan, identifikasi sumber kekuatan, penentuan arah secara bersama-sama masyarakat, penemuan bersama, pemahaman sistem sumber kekuatan, analisis kapasitas sumber, menyusun kerangka pemecahan masalah); dalam pengembangan masyarakat. Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral dan sosial bersama.

3. Jurusan PMI

Mengingat pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh LSM Dian Desa Yogyakarta baru sebatas pengelolaan terhadap kulit ikan pari serta hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat pesisir yang ada maka untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan laut dan potensi alam yang ada guna mengatasi berbagai persoalan baik kelestarian ekosistem laut dan kemiskinan masyarakat pesisir dibutuhkan kepedulian semua pihak baik masyarakat, pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi (PT) untuk bersama-sama mengelola sumber daya kelautan sebagai potensi pembangunan kelautan di masa depan.

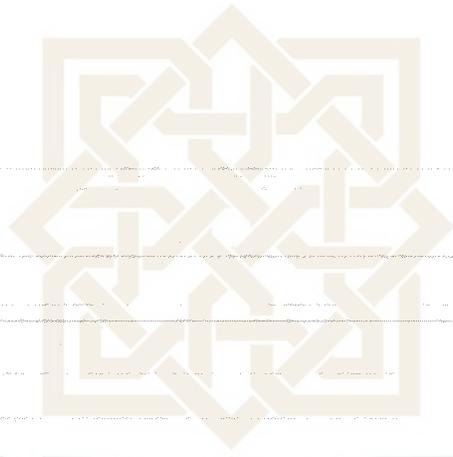
C. Penutup

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridla serta karunia-Nya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih sangat sederhana.

Upaya yang maksimal telah penulis curahkan sepenuhnya dalam rangka penyusunan skripsi ini, dengan harapan dapat tercapainya hasil yang diharapkan. Akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya, bahwa kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini pasti tidak dapat dihindari sebagai suatu kesalahan dan kekurangan diluar batas kemampuan saya sebagai manusia biasa. Dari sinilah penulis menyadari bahwa kritik yang kritis dan konstruktif yang lebih menyempurkan dari para pembaca akan diterima dengan lapang dada sebagai masukan yang baik, dan merupakan alternatif untuk belajar dari pengalaman.

Kesadaran yang dalam dan semangat yang lebih maju memberikan sebuah pengalaman bagi penulis untuk membuka dan menerima segala kritik dan saran yang mengarah pada sedikit penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon doa semoga ilmu yang telah didapat bermanfaat bagi sesama, dan selalu mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengamalkannya. Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1999, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Renika.
- Bryson, John, 2001, *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bambang Amawan, 2000, *Pemberdayaan Orang Miskin*, Jakarta: Puspa Swara.
- Britha Mikkelsen, 2001, *Metode Penelitian Partisipatif dalam Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Cipta, Arba, Syarofin, M.F., "*Potensi Laut dan Masa Depan*", Dalam Kedaulatan Rakyat, 13 Agustus, 2003
- Chamberts, Robert, 1996, *Participatory Rular Appraisal : Memahami Desa secara Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius.
- Djohan. Rianingsih dkk. (Tim. Ed), 1996, *Berbuat bersama berperan setara : Acuan Penerapan Partisipatory Rular Appraisal*, Bandung, Studio Driya Media.
- Dadang Juliantara, 1998, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta, Kanisius.
- Esrom Aritonang, dkk, 2001, *Perdampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta, Sekretariat Bina Desa.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Membaerdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama.
- Ginjar Kartasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, CIDES.
- Gunawan Sumodiningrat, 1988, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Harry Hikmat, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Humaniora.
- Heru Nugroho, 2001, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ja'far M Puteh, 2000, *Strategi Menghadapi Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Koesnadi Hardja Soemantri, 1995, *Pemberdayaan Masyarakat berwawasan lingkungan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kedaulatan Rakyat*, Senin, 06 Maret 2006, hal. 14.
- Koesnadi, 1997, “*Kemiskinan Nelayan dan Pembangunan desa Pantai*”, Kumpulan karangan tersebar. Seri Kertas Kerja No.3, Agustus.Jember:Pusat Studi komunitas Pantai.
- Loekman Soetrisno, 2001, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mubyarto, dkk, 1984, *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Antropologi Ekonomi di Dua Desa Pantai*, Jakarta, C.V. Rajawali.
- Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep arah dan Strategi*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Moh. Ali Aziz dkk., 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Moh. Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Noeng Muhajir, 2000, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, Yogyakarta, Rake Sarasin 2000.
- Pijono, Onny dan Pranaka, 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS.

Team Work Iapera, 2001, *Politik Pemberdayaan : Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta, Iapera Pustaka Utama.

Sunyoto Usman, 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sutrisno Hadi, 1992, *Methodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset.

Sugihen, Bahrein T Sugihen, 1996, *Sosiologi Pedesaan; Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Siti Aminah, 2000, "Gandang Bakau dan Orang Pesisir" dalam Muhammad HidayatRahz (ed.), *Kita Masih Harus Merawat Bumi (Antologi Kisah Mencintai Lingkungan)*, Bandung, Ashoka Indonesia.

Wiryono, 1995, *Visi, Komitmen dan Aksi Bagaimana Mengembangkannya*", dalam Hardaputranta (ed.), *Pendampingan untuk Transformasi Sosial*, Jakarta, LPPS-KWI.

